

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas kritis untuk meninjau, membedah, dan mengkaji kembali berbagai literatur serta karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti terdahulu terkait topik yang sedang diteliti. Proses ini bukan sekadar mengumpulkan daftar bacaan, melainkan sebuah upaya untuk memetakan posisi penelitian saat ini di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dengan menyusun tinjauan pustaka yang komprehensif, peneliti dapat menyarikan berbagai temuan serta metodologi dari penelitian terdahulu guna mendapatkan gambaran utuh mengenai peta permasalahan yang akan dibedah.

Selain itu, tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menjawab berbagai tantangan dan keraguan yang sering muncul pada tahap awal penelitian. Melalui kajian literatur yang mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum tersentuh oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki nilai kebaruan dan relevansi yang kuat. Dengan demikian, tinjauan pustaka menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah penelitian tetap konsisten, memiliki basis argumen yang valid, serta terhindar dari pengulangan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

2.1.1 Review Penelitian Sejenis

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan”. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan referensi dan pembandingan.

Penelaahan terhadap penelitian sejenis dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan kajian, sekaligus untuk memetakan posisi, persamaan, dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

- 1) Penelitian pertama dilakukan oleh Cindi Nainggolan dan Rahmadhona Fitri Helmi (2025) dengan judul “*Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh: Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Administrasi Kependudukan*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa menerapkan strategi komunikasi berbasis konsep 7Cs, seperti sosialisasi langsung, komunikasi interpersonal, serta pemanfaatan forum-forum desa. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan administrasi kependudukan, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas aparat desa.
- 2) Penelitian kedua dilakukan oleh Zahra Avilya Putri dan Evi Priyanti (2024) dengan judul “*Strategi Komunikasi Pemerintah dalam*

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi yang bersifat inklusif dan terbuka mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Akan tetapi, penelitian ini dilakukan pada konteks kelurahan perkotaan, sehingga dinamika komunikasi informal yang khas pada masyarakat desa belum menjadi fokus kajian.

- 3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ridho Gunawan (2025) dengan judul *“Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Event Mandi Balimau di Desa Buatan II, Kabupaten Siak*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti musyawarah desa, forum masyarakat, grup WhatsApp, serta media visual berupa poster dan papan pengumuman untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya, meskipun partisipasi masyarakat belum

merata dan pemahaman masyarakat terhadap pesan komunikasi masih terbatas.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaan konteks wilayah, fokus kegiatan, serta karakteristik masyarakat menjadi celah penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan memfokuskan kajian pada strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih menyeluruh di wilayah pedesaan.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sejenis

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cindi Nainggolan & Rahma dhona Fitri Helmi ((Nainggolan & Helmi, 2025) Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh: Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Administrasi Kependudukan	Sama-sama mengkaji strategi komunikasi Pemerintah Desa dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Fokus penelitian pada administrasi kependudukan, sedangkan penelitian ini menelaah strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Zahra Avilya Putri & Evi Priyanti ((Putri & Priyanti, 2024) Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon	Terdapat kesamaan fokus pada strategi komunikasi pemerintah dalam konteks pemerintahan lokal dengan pendekatan kualitatif	Penelitian dilakukan di wilayah kelurahan perkotaan, sedangkan penelitian ini berlokasi di desa dengan karakteristik komunikasi sosial yang berbeda
3	Muhammad Ridho Gunawan (Gunawan, 2025) Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Event Mandi Balimau di Desa Buatan II, Kabupaten Siak	Sama-sama meneliti strategi komunikasi Pemerintah Desa serta menggunakan metode kualitatif	Fokus pada kegiatan budaya lokal, sedangkan penelitian ini menekankan strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam konteks partisipasi masyarakat secara formal dan berkelanjutan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dalam mengkaji strategi komunikasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam konteks kegiatan, lokasi, serta landasan analisis. Penelitian ini menempatkan strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong dalam konteks pembangunan desa secara umum dengan menggunakan teori strategi komunikasi Effendy yang menekankan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk komunikasi yang digunakan, tetapi mendeskripsikan bagaimana komunikasi tersebut direncanakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Komunikasi

2.2.1.2 Pengertian Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama manusia hidup, maka komunikasi akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan sosialnya. Manusia adalah makhluk sosial yang terlibat komunikasi baik sebagai komunikator atau pun sebagai komunikan. Dalam berkomunikasi tentunya manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini juga tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sejak lahir dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.

Komunikasi adalah salah satu aspek elemen paling mendasar dalam kehidupan manusia. Karena tanpa komunikasi, kita tidak mampu melakukan

pertukaran informasi, saling memahami, atau menjalin interaksi sosial. Dalam pengertian yang lebih sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi dari satu individu ke individu lain dengan maksud mencapai pemahaman yang sama. Dalam studi komunikasi masa kini, dapat diungkapkan bahwa komunikasi meliputi pengiriman dan penerimaan pesan yang menghasilkan makna yang sama antara komunikator dan komunikan, serta bukan hanya sekedar pemindahan data saja (Martha et al., 2024).

Lebih dari sekedar aktivitas verbal, komunikasi merupakan cerminan dari hubungan sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap proses komunikasi, setiap orang berusaha untuk menyampaikan hal tertentu, baik berupa pesan, ide, ataupun emosi yang kemudian dimengerti oleh orang lain melalui simbol dan arti yang telah disepakati bersama. Komunikasi tidak hanya terbatas pada berbicara atau menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang respons dan makna yang muncul dari pesan tersebut.

Dalam konteks komunikasi, komunikasi tidak hanya melibatkan pengirim dan penerima, tetapi juga dinamika interaksi yang mempengaruhi sikap, keputusan dan hubungan sosial. Artinya makna yang terbentuk dalam sebuah komunikasi bukan sekedar informasi yang disampaikan, tetapi pemahaman bersama yang terbentuk saat kedua belah pihak saling terlibat dalam percakapan.

Pada era modern saat ini komunikasi juga melibatkan hubungan melalui platform digital, dimana informasi disampaikan melalui tulisan, gambar, audio, atau video yang tetap membutuhkan pemahaman dan makna bersama. Ini menunjukkan bahwa arti dalam komunikasi tidak hanya dibentuk oleh istilah kata-kata, tetapi juga

oleh konteks sosial, pengalaman individu, dan teknologi yang dipakai dalam proses pertukaran informasi atau pesan tersebut (Saifurrahman et al., 2024)

Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana setiap individu berfungsi sebagai pengirim dan penerima pesan untuk mentransfer informasi atau ide. Komunikasi juga lebih dari sekedar informasi, ini adalah melibatkan atau membangun pemahaman, sikap, dan hubungan antar sosial. Dengan kemajuan teknologi komunikasi juga bisa berlangsung melalui platform digital dengan berbagai pesan dan informasi.

2.2.1.1 Unsur-Unsur Komunikasi

Komunikasi terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan dalam membentuk proses penyampaian pesan. Unsur tersebut meliputi komunikator sebagai pihak yang menyampaikan pesan, pesan sebagai informasi atau gagasan yang disampaikan, media sebagai saluran yang digunakan, komunikan sebagai penerima pesan, serta efek sebagai respons yang muncul setelah pesan diterima.

Dalam konteks Pemerintah Desa, komunikator dapat berupa Kepala Desa, perangkat desa, maupun pihak lain yang diberi kewenangan untuk menyampaikan informasi. Pesan dapat berupa informasi mengenai program pembangunan, kebijakan, jadwal kegiatan, maupun ajakan kepada masyarakat untuk terlibat. Media dapat berupa komunikasi tatap muka, musyawarah desa, forum masyarakat, maupun media digital. Sementara itu, komunikan merupakan masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi dan efek dapat terlihat dari pemahaman, sikap, maupun respons masyarakat.

Unsur-unsur tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai unsur pendukung untuk memahami proses komunikasi, bukan sebagai dimensi utama teori strategi komunikasi.

2.2.1.3 Tujuan Komunikasi

Tujuan dari komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi dari pengirim kepada penerima, yang selanjutnya di proses dan di artikan informasi itu untuk menghasilkan atau menciptakan makna. Komunikasi yang efektif tidak hanya memerlukan penyampaian yang jelas, tetapi juga keterlibatan dalam mendengarkan, memberikan feedback / umpan balik, serta memahami latar belakang budaya tempat komunikasi itu terjadi.

2.2.1.4 Fungsi Komunikasi

Fungsi utama dari komunikasi adalah untuk menginformasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Komunikasi tidak hanya berbicara atau bertukar informasi, tetapi memiliki peran dasar sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara efektif dan jelas agar pesan dapat dipahami oleh orang lain. Dalam aktivitas sehari-hari, fungsi komunikasi ini untuk memudahkan orang untuk saling mengenal fakta fakta, data, atau keadaan tertentu untuk mengambil keputusan dalam berbagai situasi sosial atau professional.

Fungsi komunikasi mencakup tujuan atau manfaat yang dihasilkan dari proses bertukar nya informasi. Menurut para ahli yang dikutip dalam (Wahyudi et al., 2023) menjelaskan bahwa ada empat fungsi utama dari komunikasi yang melibatkan kehidupan yaitu :

1) Fungsi Informatif

Fungsi ini adalah salah satu fungsi penting dalam berinteraksi, yang dimana ini berfokus pada penyebaran pengetahuan kepada orang yang menerima pesan. Melalui komunikasi yang bersifat informatif, pengirim pesan mencoba untuk memberikan deskripsi, penjelasan, atau pemahaman tentang suatu topik dengan cara yang jelas dan terstruktur.

2) Fungsi Persuasif

Fungsi komunikasi ini bertujuan untuk mempengaruhi cara pikir, sikap, dan Tindakan seseorang yang menerima informasi agar sejalan dengan maksud tujuan si pengirim. Dengan menggunakan komunikasi persuasif, informasi disampaikan dengan cara yang meyakinkan tanpa adanya paksaan, sehingga penerima merasa terdorong untuk menerima dan mengikuti saran yang diberikan.

3) Fungsi Edukatif

Fungsi komunikasi ini berfokus pada cara mendistribusikan pembelajaran kepada orang yang menerima pesan. Dengan komunikasi edukatif, pesan dirancang untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam menyerap pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan, serta membangun sikap yang lebih positif.

4) Fungsi Integratif

Fungsi dari komunikasi ini sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan yang positif antara pengirim pesan dan penerimanya. Melalui komunikasi ini, munculah suasana saling

menghormati, memahami, dan menguatkan rasa kebersamaan, sehingga proses interaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan harmonis dan berkelanjutan.

Dengan mengetahui berbagai peran komunikasi, kita bisa memanfaatkan cara untuk berkomunikasi dengan lebih efisien di berbagai situasi. Komunikasi tidak sekedar untuk menyampaikan informasi, tapi juga untuk mempengaruhi sikap dan tindakan, mendukung proses belajar, serta memperkuat hubungan antar sosial. Pengetahuan ini juga mendukung komunikasi agar lebih tepat dan dapat menciptakan interaksi yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks profesional.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi komunikasi merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menjalankan fungsi sebagai media untuk mengirimkan pesan, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk membangun pengertian serta interaksi antar individu. Fungsi ini meliputi penyebaran informasi, mempengaruhi pandangan dan perilaku, mendukung proses belajar, serta menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan mengetahui fungsi ini, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menciptakan komunikasi yang positif.

2.2.2 Strategi Komunikasi

2.2.2.1 Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi pada dasarnya merupakan proses perencanaan (*planning*) yang disertai pengelolaan (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pencapaian tujuan, tetapi

juga menjelaskan langkah-langkah operasional serta taktik pelaksanaannya secara konkret agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien (Effendy, 2009).

Strategi komunikasi merupakan bagian penting dalam proses pencapaian tujuan komunikasi karena berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau lembaga merencanakan dan mengelola kegiatan komunikasinya. Strategi komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga mencakup proses perencanaan dan pengelolaan komunikasi agar pesan dapat disampaikan secara efektif kepada khalayak.

Menurut Effendy (2009), strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, strategi komunikasi tidak berhenti pada tahap penyusunan rencana, tetapi juga mencakup bagaimana rencana tersebut dikelola dan dilaksanakan dalam situasi yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi perlu memperhatikan kondisi khalayak, tujuan komunikasi, pesan yang disampaikan, serta cara komunikasi tersebut dilaksanakan. Hal tersebut diperlukan agar komunikasi yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, konsep strategi komunikasi digunakan untuk memahami bagaimana Pemerintah Desa Cikalong merencanakan dan mengelola komunikasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan dua dimensi utama yang dikemukakan Effendy, yaitu perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi.

Menurut Anwar Arifin dalam bukunya *Strategi Komunikasi*, menyatakan bahwa “sesungguhnya suatu strategi Adalah keseluruhan Keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan untuk mencapai efektivitas”. Strategi memungkinkan perubahan khalayak secara seadar, mudah dan cepat. (Arifin, 2016).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang digunakan untuk mengelola proses komunikasi dengan memperhatikan seluruh unsur komunikasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, strategi komunikasi menjadi penting untuk memahami bagaimana Pemerintah Desa merancang dan melaksanakan komunikasi kepada Masyarakat dalam Upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam berbagai kegiatan Pembangunan desa.

2.2.3 Pemerintah Desa

2.2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa memiliki kedudukan unik dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana desa tidak berada di bawah hierarki langsung kecamatan. Hal ini dikarenakan kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan desa berdiri sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mandiri. Perbedaan mendasar juga terlihat antara desa dengan kelurahan; jika kelurahan terintegrasi sepenuhnya dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, desa justru memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi desa ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan mandat bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan alokasi anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada prakarsa masyarakat. Undang-undang ini memperkuat posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang setara namun memiliki karakteristik fungsi yang berbeda dengan kelurahan di wilayah perkotaan. Dengan adanya payung hukum ini, desa diberikan wewenang untuk mengelola potensi daerahnya demi kesejahteraan masyarakat tanpa harus selalu bergantung pada instruksi hierarki di atasnya.

Secara spesifik, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa didefinisikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut menegaskan bahwa peran Pemerintah Desa bersifat eksekutif di tingkat lokal, yang strukturnya terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) undang-

undang yang sama. Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki wewenang penuh untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan publik berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, serta tradisi hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

2.2.3.2 Fungsi dan Kewenangan Desa

Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Sebagaimana di atur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 10). Kewenangan desa mencakup:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat desa yang telah ada.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang didelegasikan ke desa, khususnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara langsung.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dengan kewenangan tersebut, desa memainkan peran strategis dalam pengelolaan wilayahnya, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, proses ini memastikan program pembangunan efektif serta tepat sasaran.

2.2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan

desa yang akuntabel, pelaksanaan program pembangunan fisik maupun non-fisik, hingga pembinaan serta pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan sarana prasarana desa. Secara fundamental, tujuan utama dari proses ini adalah mewujudkan tatanan masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera secara lahir maupun batin. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa ini nantinya akan menjadi landasan kokoh bagi tahapan pembangunan nasional yang lebih luas menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Dalam penelitian ini, pembangunan desa menjadi konteks tempat strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong dikaji.

2.2.5 Partisipasi masyarakat

2.2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan desa, yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif pada setiap program pemerintah. Keterlibatan ini mencakup tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi jangka

panjang. Sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mewajibkan musyawarah desa untuk partisipasi masyarakat.

Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung disetiap program kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Bentuk keterlibatan tersebut menjadi konteks penelitian untuk melihat bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Desa dapat mendorong masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam kegiatan pembangunan.

2.2.5.2 Bentuk partisipasi masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup tiga tahap utama, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan musyawarah untuk perencanaan hingga evaluasi.

1) Partisipasi dalam perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan, berupa kehadiran di musyawarah desa, pemberian usulan, penyampaian aspirasi, serta pengambilan keputusan seperti Musrenbang Desa (Musyawarah Pembangunan Desa).

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

keterlibatan dalam menjalankan program yang di rencanakan, melalui kontribusi tenaga, pemikiran, materi, atau dukungan sosial terhadap kegiatan desa.

3) Partisipasi dalam evaluasi

keterlibatan dalam menilai program yang dilakukan, dengan masukan, kritik atau saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi masyarakat tersebut digunakan sebagai konteks untuk memahami keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Bentuk partisipasi tersebut tidak digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan strategi komunikasi, melainkan sebagai bagian dari fenomena yang dideskripsikan dalam kaitannya dengan strategi komunikasi Pemerintah Desa.

2.2.5.3 Hubungan strategi komunikasi dengan partisipasi masyarakat

Strategi komunikasi memiliki peran krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat, memungkinkan Pemerintah Desa menyampaikan informasi pembangunan secara jelas, transparan, dan persuasif. Komunikasi terencana ini menjembatani dimensi effendy dengan tahap partisipasi. (Nurhasanah et al., 2024)

Dalam tahap perencanaan komunikasi, penetapan tujuan yang jelas serta identifikasi khalayak, membantu Pemerintah Desa memahami karakteristik Masyarakat sehingga pesan yang disampaikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial.

Selanjutnya pada tahap manajemen komunikasi, pemilihan komunikator yang kredibel dan penggunaan media yang tepat akan mempermudah proses penyampaian pesan. Komunikasi yang efektif mampu membangun kepercayaan (trust) antara Pemerintah Desa dan Masyarakat, sehingga mendorong munculnya partisipasi aktif, baik dalam perencanaan, maupun evaluasi program.

Dalam penelitian ini, strategi komunikasi dipahami sebagai upaya Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi, membangun pemahaman, dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Proses tersebut kemudian dideskripsikan untuk memahami bagaimana masyarakat memperoleh informasi, memberikan respons, dan terlibat dalam proses pembangunan.

2.3 Kerangka teoritis

2.3.1 Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy

Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy sebagai landasan teoritis utama. Teori ini memandang strategi komunikasi sebagai perpaduan antara perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan tertentu. Teori tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang ingin mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Desa Cikalong merencanakan dan mengelola komunikasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

"Penelitian ini berlandaskan pada Teori Strategi Komunikasi dari Onong Uchjana Effendy (2009) yang tertera dalam bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Effendy mendefinisikan strategi komunikasi sebagai paduan

dari Perencanaan Komunikasi (*communication planning*) dan Manajemen Komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1.1 Perencanaan Komunikasi (*Communication Planning*)

Perencanaan komunikasi merupakan proses penyusunan rencana komunikasi yang dilakukan sebelum kegiatan komunikasi dilaksanakan. Perencanaan diperlukan untuk menentukan arah komunikasi, tujuan yang hendak dicapai, serta langkah-langkah yang akan dilakukan agar komunikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan komunikasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Desa Cikalong menyusun dan menentukan arah komunikasi sebelum kegiatan komunikasi kepada masyarakat dilaksanakan. Perencanaan komunikasi mencakup proses penentuan tujuan, pertimbangan terhadap kondisi masyarakat sebagai sasaran komunikasi, serta penyusunan rencana komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Dengan demikian, dimensi perencanaan komunikasi digunakan untuk menggali bagaimana Pemerintah Desa Cikalong mempersiapkan komunikasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2.3.1.2 Manajemen Komunikasi (*Communication Management*)

Manajemen komunikasi merupakan proses pengelolaan komunikasi dalam pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. Manajemen komunikasi berkaitan

dengan bagaimana kegiatan komunikasi dilaksanakan, dikelola, serta disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dalam proses komunikasi.

Manajemen komunikasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Desa Cikalong mengelola pelaksanaan komunikasi yang telah direncanakan. Pengelolaan tersebut mencakup bagaimana komunikasi dilaksanakan kepada masyarakat, bagaimana Pemerintah Desa menyesuaikan pelaksanaan komunikasi dengan kondisi yang dihadapi, serta bagaimana Pemerintah Desa mengetahui dan menilai respons masyarakat terhadap komunikasi yang dilakukan.

Dengan demikian, teori strategi komunikasi Onong Uchjana Effendy (2009) digunakan sebagai landasan teoritis utama dalam penelitian ini. Dua dimensi utama, yaitu perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi, digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Desa Cikalong merencanakan dan mengelola komunikasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2.3.2 Teori Konstruksi Realitas Sosial

Teori Konstruksi Realitas Sosial merupakan teori yang menjelaskan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dibangun melalui proses interaksi dan komunikasi yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karyanya *The Social Construction of Reality* (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses dialektis yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui proses tersebut, manusia secara bersama-sama menciptakan,

mempertahankan, serta memberikan makna terhadap suatu realitas sosial yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian mengenai strategi komunikasi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, teori Konstruksi Realitas Sosial digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah desa dan masyarakat membentuk pemahaman bersama mengenai pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Komunikasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena melalui komunikasi pemerintah desa menyampaikan informasi, membuka ruang dialog, menerima aspirasi, dan membangun pemaknaan bersama dengan masyarakat mengenai pembangunan desa.

Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa proses konstruksi realitas sosial berlangsung melalui tiga tahapan sebagai berikut:

2.3.2.1 Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses ketika individu atau kelompok mengekspresikan gagasan, pemikiran, nilai, maupun tindakannya ke dalam kehidupan sosial. Pada tahap ini, manusia menghasilkan berbagai bentuk tindakan dan aktivitas yang kemudian menjadi bagian dari realitas sosial di lingkungannya.

Dalam penelitian ini, eksternalisasi dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Desa Cikalong menyampaikan gagasan dan informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat. Bentuknya dapat berupa komunikasi melalui musyawarah desa, pertemuan masyarakat, penyampaian informasi secara langsung, maupun penggunaan media komunikasi yang tersedia. Melalui kegiatan tersebut,

pemerintah desa mengekspresikan kebijakan, program, dan tujuan pembangunan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, maupun pendapatnya.

2.3.2.2 Objektivasi

Objektivasi merupakan proses ketika hasil dari tindakan dan interaksi manusia kemudian menjadi sesuatu yang dianggap nyata, dikenal, dan diterima bersama dalam kehidupan sosial. Pada tahap ini, gagasan atau tindakan yang sebelumnya berasal dari individu maupun kelompok berkembang menjadi kebiasaan, aturan, nilai, atau pemahaman yang relatif diterima oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, objektivasi dapat dilihat dari bagaimana hasil komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat berkembang menjadi pemahaman bersama mengenai pembangunan desa. Misalnya, hasil musyawarah dan komunikasi mengenai kebutuhan pembangunan dapat menjadi dasar dalam menentukan program atau kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga dapat membentuk kesepahaman mengenai tujuan, kebutuhan, dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

2.3.2.3 Internalisasi

Internalisasi merupakan proses ketika realitas sosial yang telah terbentuk kemudian diterima dan dipahami oleh individu sebagai bagian dari kesadaran dan pemahamannya sendiri. Melalui proses internalisasi, nilai, norma, dan pemahaman yang berkembang dalam lingkungan sosial menjadi bagian dari cara individu memandang dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, internalisasi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memahami informasi dan pesan pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa, kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan sikap dan tindakan. Apabila masyarakat memahami tujuan pembangunan serta mengetahui manfaat dan bentuk keterlibatannya, maka pemahaman tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, baik melalui penyampaian aspirasi, kehadiran dalam musyawarah, pemberian dukungan, maupun keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, teori Konstruksi Realitas Sosial dapat digunakan untuk melihat hubungan antara komunikasi pemerintah desa, pembentukan pemahaman masyarakat, dan partisipasi dalam pembangunan. Strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah desa merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui proses komunikasi tersebut, realitas mengenai pembangunan desa tidak hanya disampaikan oleh pemerintah, tetapi juga dibentuk melalui interaksi dengan masyarakat.

Dengan demikian, teori Konstruksi Realitas Sosial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi pemerintah Desa Cikalong berperan dalam membentuk pemahaman dan makna bersama mengenai pembangunan serta partisipasi masyarakat. Proses tersebut dapat dipahami melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahapan tersebut membantu peneliti melihat bagaimana pesan pembangunan disampaikan, bagaimana pemahaman bersama terbentuk melalui interaksi pemerintah dan

masyarakat, serta bagaimana pemahaman tersebut kemudian diterima dan diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Teori ini juga memperkuat penggunaan Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy dalam penelitian. Jika teori strategi komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah desa merencanakan dan melaksanakan komunikasi dalam mencapai tujuan tertentu, maka Teori Konstruksi Realitas Sosial digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi tersebut menghasilkan proses pembentukan pemahaman dan realitas sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, kedua teori tersebut dapat digunakan secara saling melengkapi dalam menganalisis strategi komunikasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga melalui penyampaian aspirasi, pemberian dukungan, serta keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi menjadi salah satu sarana penting bagi Pemerintah Desa untuk menyampaikan informasi pembangunan sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat.

Pemerintah Desa memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Agar informasi tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik, diperlukan strategi komunikasi yang

disusun dan dilaksanakan secara terarah sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai sasaran komunikasi.

Dalam penelitian ini, strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong dianalisis menggunakan teori strategi komunikasi Onong Uchjana Effendy. Strategi komunikasi menurut Effendy merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori tersebut digunakan sebagai landasan utama untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa Cikalong merencanakan dan mengelola komunikasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dimensi pertama adalah perencanaan komunikasi, yang digunakan untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa Cikalong merencanakan kegiatan komunikasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan tersebut berkaitan dengan penentuan arah dan tujuan komunikasi serta pertimbangan terhadap kondisi masyarakat sebagai sasaran komunikasi.

Dimensi kedua adalah manajemen komunikasi, yang digunakan untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa Cikalong mengelola dan melaksanakan komunikasi yang telah direncanakan. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi serta bagaimana Pemerintah Desa menyesuaikan komunikasi dengan kondisi dan respons masyarakat.

Selain Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy, penelitian ini juga menggunakan Teori Konstruksi Realitas Sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana realitas sosial mengenai pembangunan dan partisipasi masyarakat

terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara Pemerintah Desa Cikalong dengan masyarakat. Realitas sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk melalui proses sosial, bukan hanya sebagai sesuatu yang telah tersedia dan diterima begitu saja oleh masyarakat.

Teori Konstruksi Realitas Sosial dalam penelitian ini dilihat melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tahap eksternalisasi digunakan untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa maupun masyarakat menyampaikan gagasan, informasi, kebutuhan, dan pandangan mengenai pembangunan melalui proses komunikasi dan interaksi. Tahap objektivasi digunakan untuk melihat bagaimana hasil komunikasi dan interaksi tersebut berkembang menjadi pemahaman atau kesepakatan bersama mengenai pembangunan dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, tahap internalisasi digunakan untuk melihat bagaimana pemahaman mengenai pembangunan dan partisipasi tersebut diterima oleh masyarakat dan menjadi bagian dari pemahaman yang kemudian dapat diwujudkan melalui tindakan.

Penggunaan kedua teori tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Cikalong merencanakan dan mengelola komunikasi melalui aspek perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Sementara itu, Teori Konstruksi Realitas Sosial Berger dan Luckmann digunakan untuk memahami bagaimana proses komunikasi dan interaksi tersebut membentuk pemahaman serta realitas sosial masyarakat mengenai pembangunan dan partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai fenomena yang berkaitan dengan strategi komunikasi dan proses konstruksi realitas sosial, bukan sebagai dimensi teori tersendiri yang digunakan untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

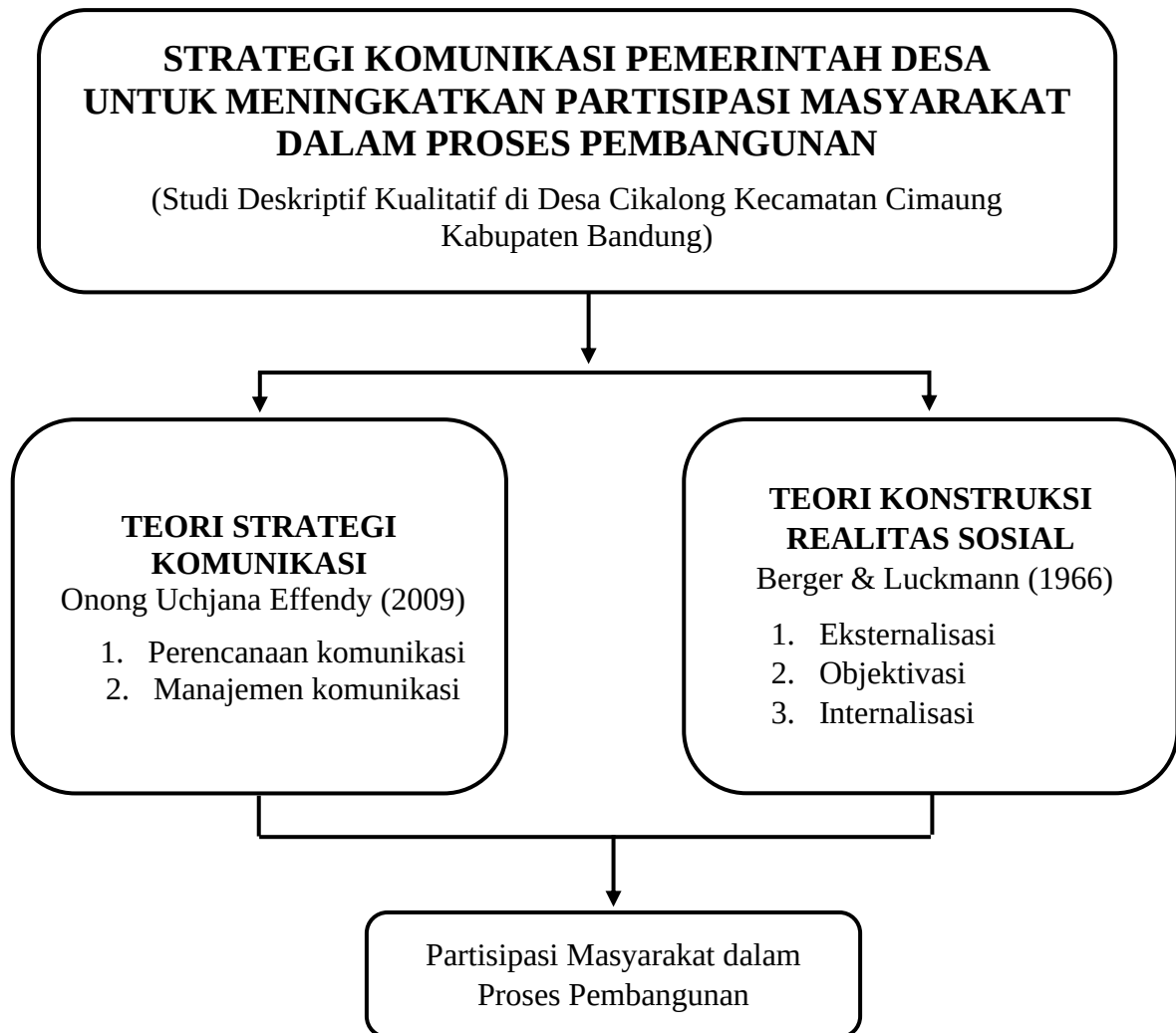
Melalui kedua landasan teori tersebut, penelitian ini berupaya mendeskripsikan strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sekaligus memahami bagaimana komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat membentuk pemahaman bersama mengenai pembangunan serta pentingnya keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong yang dianalisis melalui dua dimensi Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy, yaitu perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi, serta dianalisis lebih lanjut melalui Teori Konstruksi Realitas Sosial Berger dan Luckmann yang meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kedua teori tersebut digunakan untuk memahami proses komunikasi Pemerintah Desa dalam membangun pemahaman masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian mengenai “Strategi Komunikasi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Proses Pembangunan” selanjutnya digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti